

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta : Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013. hlm. 18
- Adji, Indriyanto Seno, *Pergeseran Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media Press, 2012, hlm. 4
- Agustinus Pohan, *et. all., Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012. hlm. 12
- Agustinus Pohan dan Topo Santoso *Et. All, Panduan Investigasi dan Penuntutan Hukum Terpadu*, Bogor : CIFOR, 2015. hlm. 15
- Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013. hlm. 9, 10
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, 2012. hlm. 11
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deeppublishing, 2015. hlm. 12
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, , Yogyakarta : Rangkang Education, 2012. hlm. 15
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: P.T. Alumni, 2010, hlm. 4
- Bambang Widjojanto, *Problem, Kritik, dan Perdebatan Penegakan Hukum Korupsi*, Jakarta : Kemitraan Partnership, 2015. hlm. 18
- Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2015. hlm. 16
- Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan*, Yogyakarta : Deeppublish, 2016. hlm. 17
- I Made Widiana, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta : Ubhara Jaya Press, 2014. hlm. 13
- I Wayan Suardana, *et. all., Tindak Pidana Khusus*, Denpasar : Planing Group, 2014. hlm. 14

- Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, Jakarta : Transmedia Pustaka, 2013. hlm. 14
- Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, Jakarta : Visimedia, 2016. hlm. 14
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Mengetahui Untuk Membasmi*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2016. hlm. 18
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007. hlm. 12
- Lis Sutinah, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, Jakarta : Tim Visi Yustisia, 2015. hlm. 22
- M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015. hlm. 3
- Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Untuk Perjalanan Sejarah Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Lentera Indonesia, 2014. hlm. 11
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2013. hlm. 10, 13
- Mudzakir, *Laporan Tim Kompendium Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014. hlm. 16
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013. hlm. 22
- Raoul Wallenberg Educational Team, *Negara Hukum*, Anna van Saksenlaan 51, Netherland : Hill, 2014. hlm. 9
- Restaria F Hutabarat, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Berspektif Hak Asasi Manusia dan Berkeadilan Gender*, Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center, 2013. hlm. 12
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh belas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 hlm. 22
- Tanpa Nama, *Sejarah dan Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa*, Riau : Unv. Riau Press, 2016. hlm. 22
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010. hlm. 12

Tim Yustisia, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Tim Yustisia, 2015. hlm. 8

Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan*, Yogyakarta : Deepublish, 2015. hlm. 13

2. Undang – undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hlm. 2, 8

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. hlm. 1, 2, 5, dan 8

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hlm. 1, 2, 5, 8, 15

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. hlm. 16, 17.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hlm. 1, 2, 5, 8, 15

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi. hlm. 8

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2014 tentang Desa, hlm. 2, 3, 8,

3. Artikel dan Jurnal

Fenomena Korupsi Pejabat Desa Lemahnya Pengawasan Hierarki.” <http://www.online24.jam.com/2017/02/18/35778.htm>. 5 April 2017. hlm. 1

<http://beritabekasi.co.id/2014/08/soal-korupsi-add-warga-kabupaten-bekasi-pertanyakan-kinerja-kejari/> hlm. 4

Kasus Korupsi yang Melibatkan Aparat Desa.” <https://erickosinuhaji.wordpress.com/2016/03/17/6-kasus-korupsi-yang-melibatkan-aparat-desa/> 18 April 2017. hlm. 1

4. Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tambelang

Observasi pada Majalah Dinding Desa Sukabakti mengenai Program-Program ADD, Penyaluran dan Penyerapan ADD, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019.

Observasi pada Majalah Dinding Desa Sukamaju mengenai Program-Program ADD, Penyaluran dan Penyerapan ADD, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019.

Observasi pada Majalah Dinding Desa Sukamantri mengenai Program-Program ADD, Penyaluran dan Penyerapan ADD, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019.

Observasi pada Majalah Dinding Desa Sukarahayu mengenai Program-Program ADD, Penyaluran dan Penyerapan ADD, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019.

Observasi pada Majalah Dinding Desa Sukaraja mengenai Program-Program ADD, Penyaluran dan Penyerapan ADD, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019.

Observasi pada Majalah Dinding Desa Sukarapih mengenai Program-Program ADD, Penyaluran dan Penyerapan ADD, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019.

Observasi pada Majalah Dinding Desa Sukawijaya mengenai Program-Program ADD, Penyaluran dan Penyerapan ADD, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019.

5. Laporan Kinerja Aparat Desa di Kecamatan Tambelang

Observasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Desa Sukabakti Periode 2016-2018, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019.

Observasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Desa Sukamaju Periode 2016-2018, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019

Observasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Desa Sukamantri Periode 2016-2018, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019

Observasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Desa Sukarahayu Periode 2016-2018, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019

Observasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Desa Sukaraja Periode 2016-2018, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019

Observasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Desa Sukarapih Periode 2016-2018, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019

Observasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Desa Sukawijaya Periode 2016-2018, yang dilaksanakan pada 15-21 Februari 2019